

## Relasi Kuasa Pada Fenomena Tawaran Jadi Buzzer Ajakan Damai Indonesia dalam Ruang Digital: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Satria Wahyu Firdausyi Gunawan<sup>1</sup>, Haris Shofiyuddin<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>2</sup>

[firdausyigunawan@gmail.com](mailto:firdausyigunawan@gmail.com)

[harishshofiyuddin@uinsa.ac.id](mailto:harishshofiyuddin@uinsa.ac.id)

### Abstract:

*This research analyzes the phenomenon of "buzzer offers to influencers" on social media. This phenomenon has become problematic because it occurred during demonstrations that were still heated in several areas, and another narrative has circulated claiming that the offer came from a 10-year-old child.. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), yhis research seeks to uncover how this discourse construction is produced through digital communication practices with the attempt to utilize independent public figures to influence public opinion. The research method used is descriptive qualitative with a Critical Discourse Analysis approach, focusing on three dimensions: text, discourse practice, and social practice. The results show that the discourse that exists is a disguised hegemonic effort to control the public narrative amidst social instability. In the text dimension, polite phrases (euphemisms) are used to disguise the political nature of the offer. In the discourse practice dimension, this phenomenon attempts to control public opinion in the digital space through influencers as intermediaries. Meanwhile, in the social practice dimension, this phenomenon reflects how power is used to manipulate public narratives, reproduce ideologies, and ultimately influence public perception of the influencers involved.*

**Keywords:** Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Social Media

### Abstrak:

Penelitian ini menganalisis fenomena “tawaran menjadi buzzer ajakan damai di ruang digital”. Fenomena ini menjadi problematik karena terjadi pada massa demonstrasi yang masih panas di beberapa daerah, serta beredarnya narasi lain yang mengeklaim bahwa tawaran tersebut berasal dari seorang anak berusia 10 tahun. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana kontruksi wacana ini diproduksi melalui praktik komunikasi digital dengan usaha memanfaatkan figur publik independen untuk mempengaruhi opini publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis dengan berfokus pada tiga dimensi; teks, praktik wacana, praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana yang hadir tersebut merupakan upaya hegemoni yang disamarkan untuk mengendalikan narasi publik ditengah ketidakstabilan sosial. Pada dimensi teks terdapat penggunaan frasa yang sopan (eufemisme) untuk menutupi sifat politik dari tawaran. Pada dimensi praktik wacana, fenomena tersebut berusaha mengontrol opini publik di ruang digital melalui *influencer* sebagai perantara. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, fenomena tersebut merefleksikan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memanipulasi narasi publik, mereproduksi ideologi, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pandangan publik pada para *influencer* yang terlibat.

**Kata kunci:** Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, Media Sosial

**PENDAHULUAN**

Dinamika komunikasi politik di Indonesia hingga kini masih tidak terlepas dari peran media sosial sebagai wadah utama pertarungan narasi publik. Media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi yang didasarkan pada layanan internet yang membangun fondasi ideologi dan teknologi, serta meemungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dibuat masing-masing pengguna (Hermawansyah, 2022). Media sosial juga tidak lepas dari salah satu perangkat dalam menyebarkan dan memperoleh informasi di era digital saat ini. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Lebih dari 50% hingga 70% terdapat pengguna aktif media sosial di Indonesia (Zulaikha & Pulungan, 2023). Munculnya ruang digital yang masif telah melahirkan fenomena baru, salah satunya adalah industri “buzzer politik”, manipulasi opini, dan penyebar propaganda. Kehadiran buzzer politik diyakini dapat mencederai demokrasi dan meningkatkan polarisasi dalam masyarakat melalui konten yang memecah belah.

Salah satu fenomena terkait muncul Saat di tengah gejolak sosial yang disertai dengan protes dan beberapa tuntutan akan kejelasan mengenai kinerja pemerintah, sebuah kasus yang viral muncul di salah satu platform digital yaitu Instagram. Kasus ini berkaitan dengan unggahan salah satu influencer, yaitu Jerome Polin dan penolakannya secara terbuka terhadap tawaran sebesar Rp 150 juta untuk menjadi buzzer. Tawaran yang dibuat bertujuan untuk mengunggah narasi demi meredakan protes publik selama masa demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. fenomena tersebut menjadi representasi kritis dari narasi yang bersaing antara kekuasaan dan aspirasi rakyat. Pengungkapan salah satu influencer, yaitu Jerome Polin memicu reaksi berantai yang sangat cepat dan luas. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Jerome menolaknya dan kemudian secara terbuka mengutuk penggunaan uang pajak untuk apa yang dianggapnya sekadar aksi publisitas. Ia membandingkan uang tersebut dengan apa yang dihadapi rakyat yang didefinisikan sebagai hal penting, seperti kebutuhan akan kenaikan gaji yang layak untuk guru, yang ia klaim akan meningkatkan kesejahteraan 15 guru dalam sebulan. Reaksi Jerome sangat merupakan ledakan kemarahan kolektif oleh para netizen yang kemudian mencatatkan praktik pemerintah dalam membayar pajak untuk menggunakan "buzzer" untuk kepentingan pemerintah.

Wacana adalah satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu merupakan deretan kata atau ujaran. Wacana dapat

berbentuk lisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Fairclough menganggap diskursus sebagai praktik sosial, sehingga dia menganggap bahwa teks dan diskursus merupakan hal yang berbeda. Baginya, teks merupakan sebuah produk dari proses produksi teks dan bukan prosesnya. Perbedaan antara teks dan diskursus, bagi Fairclough, penting untuk mendukung konsepsinya tentang diskursus sebagai praktik (Munfarida, 2014). Menurut Norman Fairclough dalam analisis wacana kritis terdapat tiga dimensi utama yang dapat dianalisis, yaitu dimensi teks, dimensi diskursus, dan dimensi praktik sosial. Dalam pandangannya dimensi teks berfokus pada analisis teks tertentu yang memuat suatu fenomena atau permasalahan, pada dimensi ini mencakup analisis struktur dan makna teks baik berupa lisan maupun tulisan. Pada dimensi diskursus (wacana) berfokus pada bagaimana suatu wacana diproduksi dan dikonsumsi oleh publik. Selain itu pada dimensi praktik sosial berfokus pada bagaimana konteks sosial masyarakat dan politik dapat menghadirkan suatu teks wacana (Sasmitha, 2023).

Pentingnya analisis wacana dalam distribusi informasi di media sosial karena tidak hanya sekedar menganalisis wacana atau teks saja, melainkan juga menyelidiki koneksi antara unsur-unsur dalam proses sosial dengan cara yang sistematis. Analisis wacana yang bersifat kritis tidak hanya menyampaikan komentar deskriptif tentang wacana, tetapi juga lebih mendalam terlibat analisis komprehensif dari teks. Analisis wacana kritis meneliti secara analisis keterkaitan antara bahasa, ideologi, kekuasaan, dan struktur sosial, contohnya ketimpangan sosial yang ada dibangun, diproduksi kembali, dan dilegitimasi, dan dihadapi menggunakan bahasa serta metode komunikasi lainnya. Di samping itu, analisis wacana kritis berfungsi untuk memahami secara komprehensif arti dalam wacana, agar tidak terperangkap dalam wacana yang dibuat untuk tujuan tertentu (Ardiansyah, 2024). Fairclough menekankan bahwa AWK tidak hanya menganalisis teks, tetapi juga memperhatikan konteks sosial lebih luas, termasuk bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja melalui bahasa (Hazimah et al., 2024).

## KAJIAN PUSTAKA

*Buzzer* merupakan kata dari bahasa Inggris yang berarti pendengung. Istilah tersebut awalnya hanya digunakan di ranah media pemasaran sebagai strategi dalam memasarkan suatu produk atau jasa untuk meningkatkan keuntungan dalam berbisnis melalui arus informasi. Namun dalam perkembangannya, istilah *buzzer* seringkali digunakan diluar tujuan

bisnis dengan tujuan untuk menggalang dan mengontrol persepsi publik (Boy Anugerah, 2022). Perubahan semantik ini tidak mungkin merupakan perkembangan netral dari suatu bahasa. Misalnya, perubahan suatu dan makna kata “buzzer” dari sebuah entitas komersial menjadi entitas politik penuh dengan konotasi negatif menunjukkan perkembangan sosial dan politik yang jauh lebih kompleks. Munculnya “buzzer” di ranah politik menandai perubahan dalam tingkat kesadaran masyarakat. Perluasan makna ini juga menandai kekalahan wacana yang berupaya menormalisasi praktik-praktik tersebut, di mana masyarakat secara kolektif menanamkan sentimen negatif secara inheren pada kata itu sendiri. Fenomena buzzer ini tidak hanya merusak etika komunikasi politik tetapi juga memperdalam polarisasi masyarakat. Praktik seperti kampanye hitam dan penyebaran disinformasi telah memicu kerusuhan sosial. Studi menunjukkan bahwa buzzer berhasil mengamplifikasi disinformasi dan ujaran kebencian melalui algoritma media sosial, menciptakan apa yang dikenal sebagai “filter bubbles” dan “echo chambers” di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini mempersulit masyarakat untuk melihat isu dari berbagai sudut pandang dan membuat mereka lebih mudah terprovokasi.

Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti terkait fenomena buzzer, Boy Anugrah (2020) meneliti tentang “*Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia*” penelitian ini membahas tentang bsgsimns Buzzer politik umumnya menggunakan tiga sistem kerja yang terdiri dari: membangun citra positif, menglarifikasi cerita, dan menyerang citra pesaing. Selain itu buzzer politik dapat dibagi menjadi dua antara independen dan relawan. Hal yang disoroti dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivasi buzzer di media sosial, sehingga memiliki dampak negatif terhadap stabilitas politik dalam negeri (Boy Anugerah, 2022).

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Buzzer Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Analisis Wacana Kritis Kicauan Buzzer Di Twitter*” yang dilakukan oleh Hanif Jati Pambudi dkk (2021) menguraikan buzzer diposisikan di pihak yang memengaruhi publik dengan membangun narasi yang menggambarkan pandemi secara negatif untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait hal tersebut. Selain itu juga mengungkapkan

bahwa buzzer menggunakan strategi retorik dan satir dalam membangun narasi (Hanif Jati Pambudi et al., 2021).

Kemudian terdapat penelitian lain berjudul *“Pengaruh Buzzer di Media Sosial Terhadap Pembentukan Opini Publik dalam Pilpres 2024”* yang dilakukan oleh Mangido Nainggolan dkk (2024). Penelitian ini menelaah bagaimana peran buzzer dalam membentuk opini publik di media sosial yang juga berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh buzzer dalam pembentukan opini di media sosial (Nainggolan et al., 2024).

Penelitian terdahulu lebih menyoroti bagaiman regulasi, kebijakan yang seharusnya ada untuk menangani para *buzzer*, serta bagaimana peran *buzzer* dalam mengalihkan isu pemerintahan. Oleh karena Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menganalisis *buzzer* yang beroperasi melalui mekanisme intervensi dan pemanfaatan figur publik independen, seperti *influencer* dalam upaya untuk menciptakan dan menyebarkan narasi “ajakan damai”, serta membongkar bagaimana narasi “ajakan damai” yang disebarkan secara masif dan seragam memperkuat adanya upaya hegemoni kekuasaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang suatu fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang mendalam dengan menyelidiki dan memahami fenomena sosial yang kompleks, termasuk pengaruh dari wacana di media sosial (Yunanto et al., 2023). Pendekatan pada penelitian kualitatif adalah kualitas, Metode kualitatif digunakan karena penting untuk memahami dan menginterpretasikan subjek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis konten dengan menganalisis makna dalam gambar atau teks yang diunggah pada platform media sosial.

Pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough digunakan untuk melihat bagaimana wacana terkait “tawaran buzzer kepada para influencer” diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi oleh publik melalui tiga dimensi wacana yang saling terkait

1. Dimensi Teks: fokus pada analisis linguistik dan semiotik terhadap teks-teks yang relevan
2. Dimensi Praktik Wacana (Diskursif): menganalisis bagaimana suatu wacana diproduksi hingga dikonsumsi oleh masyarakat, dengan melihat siapa yang membuat wacana tersebut,

mengapa wacana tersebut muncul, hingga bagaimana audiens menafsirkan dan meresponsnya.

3. Dimensi Sosiostruktural: menghubungkan wacana yang dianalisis berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan politik atau kekuasaan yang mempengaruhi keharidan teks.

Sumber data dalam penelitian ini adalah unggahan media sosial pada platform Instagram, khususnya pada para Influencer yang terlibat. Masing-masing data diambil dari tiga influencer berbeda dan para Influencer mengunggah setidaknya satu unggahan terkait tawaran buzzer “Ajakan Damai” selama mendapat masa demonstrasi yang digunakan sebagai data penelitian.

## PEMBAHASAN

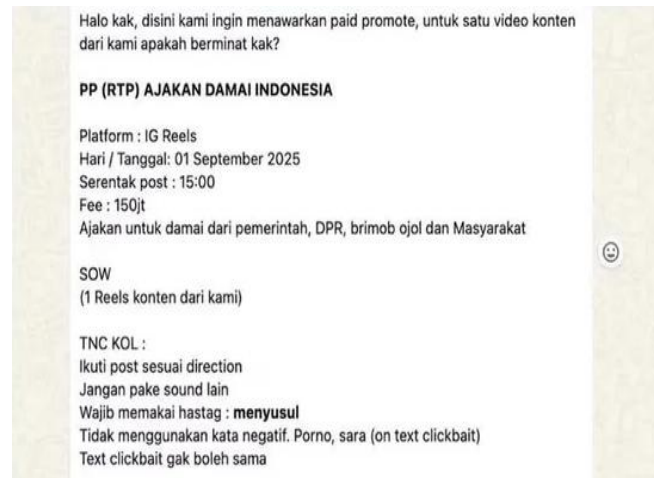
Di era Digital saat ini, peran media sosial menjadi lebih penting. Media sosial tidak hanya membantu orang berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga membantu masyarakat berpartisipasi dalam politik. Media sosial menjadi solusi ketika aspirasi masyarakat cenderung mengalami sumbatan karena dunia politik sebagai pilar utama demokrasi saat ini cenderung tidak mampu menjalankan fungsinya untuk mendengar dan menyerap aspirasi. Media sosial memberikan masyarakat kesempatan untuk berekspresi secara bebas dalam menyikapi dan mengkritisi masalah, terutama masalah yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Media sosial juga membantu para aktor politik dalam mengembangkan dan menyebarkan gagasan mereka. Dengan menggunakan media sosial untuk kepentingan politik, mereka dapat mempengaruhi maupun memanipulasi sebuah narasi sebagai upaya mengontrol opini publik. Hal tersebut juga yang menyebabkan munculnya buzzer politik atau pendengung politik. Dalam konteks politik, penggunaan media sosial biasanya dilakukan oleh aktor yang menyampaikan berbagai pendapat politik kepada publik. *Buzzer* yang memiliki banyak pengikut memiliki peluang untuk memengaruhi opini publik karena publik berkemungkinan besar akan mudah terpengaruh oleh pendapat mereka. Faktor-faktor ini yang menarik aktor politik melirik *buzzer* untuk membantu mereka dalam mengembangkan dan mengontrol opini atau narasi politik di ruang publik, terutama di media sosial.



## A. Dimensi Teks

Dalam bagian ini dimensi teks berfokus pada aspek linguistik dari teks terkait, yaitu bisa berupa pesan tawaran dalam menjadi *buzzer*, respons para influencer, serta narasi tandingan dalam wacana tawaran *buzzer* kepada para *influencer* pada masa demonstrasi.



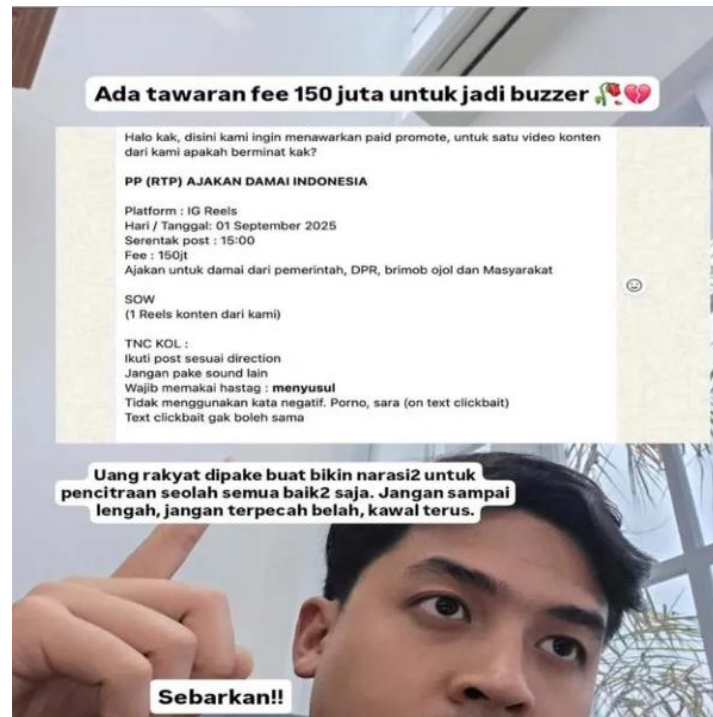
Gambar 1. Pesan Tawaran

Pesan tersebut secara eksplisit memiliki tujuan ajakan damai Indonesia di tengah panasnya masa demonstrasi. Frasa "Ajakan Damai Indonesia" secara denotatif terdengar positif dan netral, menggambarkan keinginan positif untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian. Namun secara konotatif dalam konteks demonstrasi yang sempat berlangsung sebelumnya, kata-kata ini berfungsi sebagai sebuah eufemisme (ungkapan halus) politik. Meskipun terdapat kata "damai", mengundang perdamaian bukanlah satu-satunya tujuan. Pesan tersebut memiliki tujuannya untuk menghentikan oposisi dan menciptakan narasi buatan bahwa "semuanya akan baik-baik saja" di tengah keadaan yang tegang dan penuh kerusuhan. Strategi ini bertujuan untuk memindahkan isi substansi yang berkaitan dengan tuntutan rakyat seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ke masalah yang berkaitan dengan "stabilitas". Berbagai aturan yang diberikan dalam pesan, seperti "tidak menggunakan kata negatif" dan "text clickbait tidak boleh sama", membuat upaya hegemoni narasi dan kontrol wacana oleh pihak yang memiliki kekuasaan makin kuat. Pesan tersebut juga merupakan strategi framing untuk mengalihkan perhatian publik dari akar masalah demonstrasi dan ketidakpuasan rakyat terhadap keadilan pemerintahan.

Beberapa Influencer yang terlibat tidak hanya bungkam ataupun menerima tawaran tersebut dengan mudah. Beberapa dari mereka menunjukkan sebuah perlawanan dari apa

yang mereka alami dan kemudian mengunggahnya melalui platform instagram masing-masing.

## Data 1



Gambar 2. Unggahan Jerome Polin

Beberapa influencer yang mendapat pesan tawaran untuk menjadi buzzer memperlihatkan sebuah perlawanan simbolik. Respons Jerome Polin di media sosial menunjukkan perlawanan simbolik yang efektif. "Nih, aku *spill*," adalah kata pembuka yang kuat untuk posting Instagramnya tentang tawaran tersebut. Pengungkapan rahasia atau kebenaran tersembunyi ditunjukkan dengan kata gaul "*spill*". Pilihan kata yang digunakan menunjukkan tindakan langsung dalam menentang pesan tawaran yang dibuat oleh produsen wacana, yang menunjukkan Jerome sebagai pembawa kebenaran. Selain itu, ia menggunakan kata-kata seperti "uang rakyat", "pencitraan", dan "kawal terus" yang menimbulkan pertanyaan tentang moralitas publik dan akuntabilitas. Ini mengubah topik diskusi dari etika komersial ke etika publik. Dengan menggunakan strategi ini, Jerome mengeksplorasi konteks politik yang tersembunyi di balik tawaran komersial tersebut. Puncak dari pendekatan retoriknya adalah perbandingan yang tajam antara jumlah tawaran dan kompensasi guru "1 post jika digunakan untuk menaikkan gaji guru per orang 10 juta, sudah bisa bikin 15 guru hidup sejahtera selama sebulan." Perbandingan ini sangat menarik karena mengubah angka yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat dihubungkan dengan permasalahan dirasakan oleh



masyarakat. Jerome berhasil memicu kemarahan publik yang lebih besar dengan meletakkan masalah ini dalam konteks moral. Selain itu, ia secara terbuka meminta agensi lain untuk menghindari kerugian publik. Dalam tulisannya, dia mengajak orang-orang untuk "kawal terus" yang menunjukkan upayanya untuk meningkatkan kesadaran kritis dan mendorong audiensnya untuk bertindak dengan bijak. Kemudian terdapat kata "sebar" yang disini Jerome ingin seluruh publik tahu jika praktik ini dibiarkan akan dapat mempengaruhi opini dan pandangan mereka terhadap fenomena yang diperbincangkan.

## Data 2

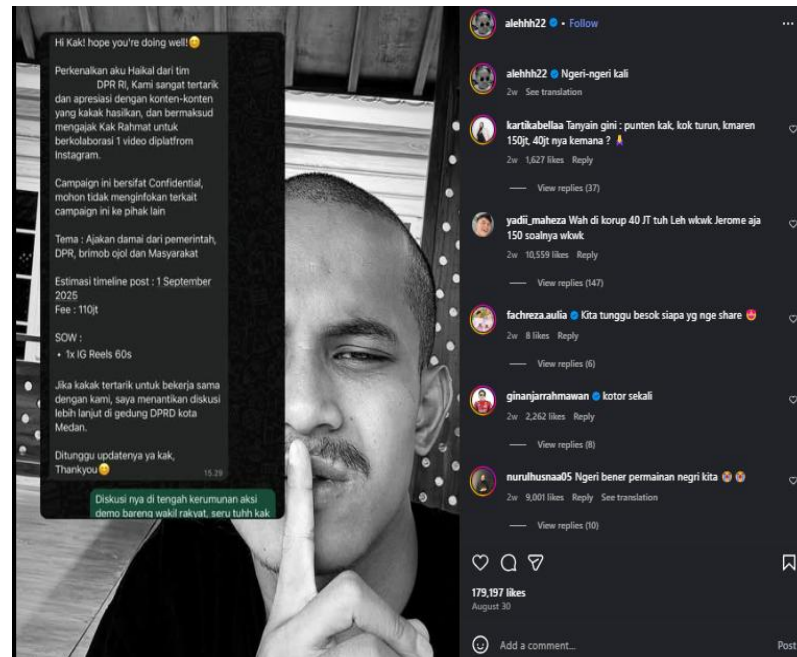


Gambar 3. Unggahan Pixmen Leonard

Pixmen Leonard, menolak tawaran buzzer dengan nominal penawaran diketahui sebesar 50 juta. Penolakannya sangat signifikan karena secara eksplisit mengungkapkan adanya struktur pembayaran yang berbeda dan valuasinya sendiri. Dia mengutarakan kalimat yang blak-blakan seperti "*Taik Rp 50 juta. Yang lain Rp 150 juta perasaan, mending jual air celup.*" Penggunaan kata kasar seperti "*taik*" disini merupakan bentuk pelanggaran norma kesopanan dalam berbahasa, namun kata tersebut dapat merekonstruksi sebuah percakapan yang serius menjadi sebuah humor yang ekspresif yang ditandai dengan adanya analogi "*mending jual air celup*" dalam merespon pesan tawaran yang dia terima. Selain itu Kata-kata kasarnya tidak hanya menunjukkan penolakan emosional, tetapi juga secara cerdas mengekspos praktik tersembunyi dari pesan tawaran ini. Dengan menyebut nominal yang ditawarkan kepada *influencer* lain "*Yang lain Rp 150 juta*", Pixmen memberikan bukti tak langsung bahwa ada hierarki dalam pasar *buzzer* politik. Honor Rp 50 juta yang ditawarkan

padanya menunjukkan bahwa pengirim pesan menilai pengaruhnya sebagai *influencer* berada di tingkat menengah, bukan yang paling tinggi.

## Data 3



Gambar 4. Unggahan Rahmat Hidayat (Aleh)

Rahmat Hidayat (Aleh), sama seperti *influencer* yang lain, ia merupakan bagian dari aksi kolektif yang juga mengunggah bukti tawaran yang datang kepada dirinya. Kalimat “*Diskusinya di tengah kerumunan rakyat aksi demo bareng wakil rakyat, seru tuhh kak*” menunjukkan bentuk penolakan disertai unsur humor. Selain itu penggunaan kata “*seru tuhh kak*” menjadi modalitas ekspresif dalam mengekspresikan pandangan Aleh terhadap permasalahan tersebut yang membuat pembahasan yang serius terkesan seakan-akan menjadi sebuah candaan sinis. karena itu hal tersebut tidak hanya sekedar memberikan kesan penolakan secara halus, namun juga menunjukkan bahwa Aleh tidak menempatkan dirinya sebagai pihak inferior (takut menolak), tetapi berusaha memandang bahwa dirinya berada di posisi yang setara. Penolakan itu juga dapat mengimplikasi bahwa tawaran tersebut tidak etis, sehingga dapat menjadi gurauan.

Tindakan perlawanan anggar satu *influencer* yang lain ini menjadi elemen penting yang mengubah dinamika peristiwa. Alih-alih menjadi satu suara perlawanan yang terisolasi, mereka secara tidak langsung membentuk sebuah front persatuan yang kuat. Sinergi ini mendukung gagasan bahwa tawaran tersebut merupakan bagian dari praktik kontrol opini publik yang lebih besar daripada hanya tindakan spontan. Aksi kolektif ini secara fundamental

menggagalkan tujuan awal, karena mereka menciptakan skandal publik tentang upaya berbayar untuk memanipulasi opini, alih-alih menyebarkan narasi "perdamaian". Keputusan yang dibuat secara kolektif oleh para *influencer* ini menunjukkan bahwa *influencer* juga memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai penghalang yang kuat dalam diskusi politik. Sehingga penolakan para *Influencer* terhadap pesan tawaran itu dapat mendiskreditkan dan menetralkan permasalahan yang tengah diperbincangkan.

Disisi lain sebuah narasi tandingan muncul di tengah respons publik yang masif, menyatakan bahwa tawaran tersebut hanyalah provokasi iseng dari seorang "bocah berusia 10 tahun". Meskipun tidak ada banyak bukti konkrit yang mendukungnya, narasi tersebut juga menjadi bagian yang penting karena berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan legitimasi secara linguistik. Wacana ini berusaha menyederhanakan permasalahan politik yang serius menjadi kenakalan anak-anak dengan menyematkan identitas "bocah atau anak-anak" yang tidak berdaya pada pengirim tawaran. Namun jika hal tersebut diyakini berasal dari anak kecil, legitimasi demonstrasi akan hilang dan masalah tersebut dapat dengan mudah dihilangkan. Ini adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemarahan publik dan mengubur masalah politik di bawah narasi yang tidak penting.

Jika dilihat dari nominal tawaran yang ditawarkan, nominal tersebut tidak hanya dalam angka 150 juta, namun bervariasi antara satu *influencer* dengan *influencer* yang lain. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat sebuah pemahaman pada para perancang atau orang dibalik penawaran tersebut tentang pasar *influencer* dan menilai setiap individu dengan tingkat jangkauan, pengaruh, dan nilai mereka di mata publik. Di sisi yang lain dengan menempatkan pesan tawaran tersebut dalam kerangka komersial (paid promotion), pelaku melakukan tindakan depolitisasi pada sebuah tindakan politik menjadi seperti transaksi sederhana layaknya sebuah bisnis yang wajar.

## **B. Dimensi Wacana**

Pada dimensi ini berfokus bagaimana teks, narasi, atau fenomena tersebut diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi oleh publik. Wacana tawaran *buzzer* ini tidak lahir dari individu semata, melainkan ada pihak dibalik layar yang berusaha memproduksi wacana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik propaganda ini tampak terencana. Produsen wacana ini memiliki cara yang cerdas dalam usaha menyebarkan narasinya, yakni berusaha mempekerjakan *buzzer* dengan menawarkan paid promote pada para *Influencer* yang

beroperasi di bawah koordinasi melalui WhatsApp. Mereka memiliki tugas yang terstruktur, seperti menyebarkan narasi dan tagar yang telah ditentukan, bahkan secara serentak. Taktik yang mereka gunakan sangat beragam, termasuk membuat akun palsu dengan identitas yang berbeda untuk terlihat lebih otentik. Di sisi lain, produksi wacana oleh Jerome Polin, Pixmen Leonard, dan Rahmat Hidayat, serta *Influencer* lainnya adalah keputusan secara sadar untuk menggunakan posisi mereka sebagai *Key Opinion Leader* untuk menolak manipulasi dan mengedukasi publik. Ini bukan sekadar respons, tetapi sebuah tindakan perlawanan kolektif. Mereka memproduksi wacana yang berorientasi pada nilai-nilai yang mereka yakini, yaitu transparansi dan keadilan. Tindakan kolektif mereka untuk mengekspos tawaran ini adalah tindakan strategis yang menunjukkan bahwa wacana perlawanan juga dapat diorganisir dan memiliki dampak yang signifikan.

Fenomena ini juga dipengaruhi oleh identitas publik dari individu yang menyuarakannya. Ketika sebuah wacana politik, terutama yang terkesan manipulatif, disuarakan oleh figur publik, seperti *influencer* maka audiens akan memprosesnya melalui pandangan kepercayaan yang telah mereka bangun. Dalam kasus ini, penolakan tawaran oleh para *influencer* tersebut dinilai sebagai tindakan yang berani dan konsisten dengan integritas mereka yang diyakini publik. Publik secara umum melihat tindakan menolak tawaran uang besar untuk propaganda sebagai sebuah sikap heroik yang dapat memperkuat citra mereka sebagai figur yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Resepsi positif ini juga didukung oleh rekam jejak mereka yang sering kali menyuarakan isu-isu sosial-politik, sehingga publik tidak melihat tindakan ini sebagai sesuatu yang oportunistik. Sebaliknya, jika tokoh publik yang dipersepsikan telah mengkompromikan integritasnya dengan menerima tawaran semacam itu akan menghadapi gelombang kritik dan amarah yang luas oleh publik. Publik berharap bahwa figur publik yang dikenal memiliki citra positif akan menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan publik, bukan untuk keuntungan finansial yang berkaitan dengan manipulasi. Dengan kata lain, publik akan mengkritik figur-figur yang dianggap "menjual" kredibilitas mereka dan mencerminkan adanya kontrol sosial di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, di mana setiap unggahan berada di bawah pengawasan, tindakan seorang figur publik dapat memicu reaksi kolektif yang mendalam dan signifikan yang dapat mempengaruhi citra mereka pada masyarakat.

### C. Dimensi Sosial

Dimensi ini mengaitkan analisis wacana dengan struktur sosial, relasi kekuasaan, dan ideologi yang lebih luas. Fenomena tawaran untuk menjadi buzzer di kalangan influencer dengan tujuan ajakan damai tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Peristiwa ini berlangsung di tengah aksi demonstrasi, ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR, dan seruan untuk transparansi dalam penggunaan uang pajak. Kondisi ini menciptakan situasi yang rentan dan memicu terjadinya wacana "Ajakan Damai Indonesia." Tawaran buzzer ini merupakan wujud dari usaha pihak berwenang untuk mengatur ruang publik dan menegaskan narasi yang menguntungkan diri mereka. Mereka berupaya menguasai diskursus dengan membeli kekuatan influencer, sebuah praktik yang menunjukkan usaha hegemoni di zaman digital. Hegemoni ini sangat tergantung pada sumber daya keuangan. Jumlah uang yang disalurkan merupakan sarana kekuasaan, digunakan untuk memperoleh narasi, memengaruhi pandangan, dan menormalkan praktik yang sesungguhnya merusak demokrasi. Dalam konteks ini, praktik buzzer politik dapat turut berperan dalam memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan di ranah digital. Pengirim pesan tawaran "ajakan damai" memberikan insentif keuangan untuk menyebarkan ideologi yang menguntungkan mereka, sehingga narasi ini dapat dipandang sebagai "kebenaran" oleh masyarakat. Pemilik kuasa kini tidak hanya memanfaatkan media konvensional, melainkan juga menggunakan platform yang dianggap "demokratis" dan "pribadi" seperti media sosial, di mana mereka berupaya menyisipkan narasi mereka dengan legitimasi dari tokoh-tokoh terkenal.

Tindakan para influencer yang terlibat berhasil mengungkap eufemisme "Ajakan Damai Indonesia" dan menunjukkannya sebagai tawaran yang menghasut. Mereka membantu penonton menyadari bahwa pesan yang terlihat positif dan netral sebenarnya memiliki kepentingan politik yang tersembunyi. Para influencer ini berperan sebagai penggerak untuk melahirkan diskursus tandingan yang kuat di kalangan masyarakat digital. Fenomena ini mengindikasikan bahwa diskursus perlawanan dapat timbul dari pelaku non-tradisional dan memiliki pengaruh yang besar.

## SIMPULAN

Tawaran paid promote jadi *buzzer* kepada para *influencer* adalah sebuah bentuk wacana yang kaya akan makna yang tidak hanya mencerminkan fenomena buzzer politik, tetapi juga mengungkap mekanisme tersembunyi dari relasi kuasa di era digital. Dengan

menerapkan model Fairclough, analisis ini menemukan bahwa; Dimensi Tekstual: Terdapat penggunaan bahasa eufemisme dan manipulasi linguistik, khususnya ketika mengaitkan pihak yang bersitegang dengan pemerintah seperti brimob, ojol dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan sebuah upaya yang disengaja dengan tujuan untuk mengontrol narasi dan mendefinisikan realitas sosial yang diinginkan oleh pihak berkuasa. Dimensi Praktik Wacana: Fenomena tersebut merupakan pengimplementasian dari komodifikasi wacana, di mana nilai ekonomi dapat dikaitkan pada kemampuan untuk memanipulasi pendapat publik di ruang digital. Aksi perlawanan dari para influencer terkait dengan membocorkan tawaran tersebut menunjukkan bahwa kuasa di ruang digital tidak terpusat, namun dapat ditantang. Dimensi Praktik Sosial: Tawaran ini adalah bentuk dari pergeseran strategi kekuasaan, dari pendekatan koersif (fisik) ke pendekatan diskursif (bahasa) sebagai pengalihan strategi terhadap kegagalan dalam penanganan demonstrasi. "ajakan damai" dalam konteks tersebut bukan sebuah pernyataan netral, melainkan alat strategis untuk mengontrol kritik dan mengalihkan perhatian publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, W. (2024). Analisis Wacana Kritis Terhadap Penyebaran Informasi Sara Di Media Sosial X. *Sustainability (Switzerland)*, 17, 302.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Boy Anugerah. (2022). Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 155–171.  
<https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.340>
- Hanif Jati Pambudi, Ario Lukito Adi Nugroho, Liliek Handoko, & Firstya Evi Dianastiti. (2021). Buzzer di Masa Pandemi Covid-19: Studi Analisis Wacana Kritis Kicauan Buzzer di Twitter. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1), 75–89.  
<https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1265>
- Hermawansyah, A. (2022). Analisis Profil Dan Karakteristik Pengguna Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Analisis*, 3.
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough.



<https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>

Nainggolan, M., Piliang, A., Silalahi, D., Jelita Ulandari, R., Kevin, S., Girsang, A., & Silitonga, S. M. (2024). Pengaruh Buzzer di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik dalam Pilpres 2024. *Journal on Education*, 07(01), 550–559.

Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program “Somasi.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 44–58. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.44-58>

Yunanto, F., Rudiyanto, M., Syaiful, S., & ... (2023). Pengaruh Wacana Kritis Di Media Sosial Terhadap Pencitraan Diri: Sebuah Tinjauan Linguistik. *Kabillah: Journal of ...*, 8(14), 56–69.

Zulaikha, A., & Pulungan, A. F. (2023). Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Depresi. *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 2(3), 60. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v2i3.9930>